

A Comparative Analysis of Facility Readiness and Management Systems for Inclusive Education in Two Private Islamic Elementary Schools in Bekasi City

Rendiansyah Dwi Saputra^{1)*}, Sholehuddin²⁾, Dewi Aisah³⁾

^{1,2,3)} Magister Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Correspondence author : rendiansyahdws@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37012/jipmht.v10i1.3540>

Abstract

Inclusive education is mandated by Minister of National Education Regulation Number 70 of 2009, requiring regular schools to accept and serve students with special needs on an equal basis. However, in practice, school readiness in implementing inclusive programs varies significantly, particularly in terms of physical facilities and management systems. This study aims to analyze and compare the readiness of facilities and management systems of inclusive programs between two private Islamic elementary schools in Bekasi City, located in Jatiasih District (School A) and South Bekasi District (School B). The method used is descriptive comparative qualitative through direct observation, semi-structured interviews with principals, classroom teachers, and special assistant teachers (GPK), as well as review of school policy documents. The results indicate that both schools have different readiness profiles: School A excels in physical facility completeness and management system digitalization, while School B demonstrates strengths in education accessibility, cross-subsidy systems, and school community cohesion oriented toward student independence. This study recommends standardization of inclusive facilities based on ministerial regulations, capacity building for GPK, and transparency of inclusive program information to the public at both schools.

Keywords: *Inclusive School, Facility Readiness, Management System, Students with Special Needs, Primary Education*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yang mewajibkan sekolah reguler menerima dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) secara setara. Namun di lapangan, kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan program inklusi masih sangat bervariasi, terutama dari sisi fasilitas fisik dan sistem manajemen. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan tingkat kesiapan fasilitas serta sistem manajemen program inklusi antara dua sekolah dasar swasta Islam di Kota Bekasi, masing-masing berlokasi di Kecamatan Jatiasih (Sekolah A) dan Kecamatan Bekasi Selatan (Sekolah B). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif komparatif melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan kepala sekolah, guru kelas, dan guru pendamping khusus (GPK), serta telaah dokumen kebijakan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sekolah memiliki profil kesiapan yang berbeda: Sekolah A lebih unggul dalam kelengkapan fasilitas fisik dan digitalisasi sistem manajemen, sementara Sekolah B memiliki keunggulan dari sisi keterjangkauan akses pendidikan, sistem subsidi silang, dan kekuatan komunitas sekolah yang berorientasi pada kemandirian peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standarisasi fasilitas inklusi berbasis Permendiknas, peningkatan kapasitas GPK, serta transparansi informasi program inklusi kepada publik di kedua sekolah.

Kata Kunci: Sekolah Inklusi, Kesiapan Fasilitas, Sistem Manajemen, Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Dasar.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif telah menjadi paradigma global dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan. Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) menjadi tonggak awal pengakuan internasional bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), berhak mendapatkan pendidikan di sekolah reguler bersama teman sebayanya. Kesepakatan ini kemudian diperkuat melalui Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 yang menargetkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua kalangan tanpa terkecuali.

Di tingkat nasional, Indonesia telah merespons komitmen global tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan satu sekolah menengah atas di setiap kecamatan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas semakin memperkuat hak setiap individu atas pendidikan yang layak dan bebas dari diskriminasi. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Penelitian tentang fasilitas ruang khusus pada sekolah inklusi menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada standar fasilitas kebutuhan ruang untuk sekolah inklusi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Eprints ITENAS, 2021). Kondisi ini menyebabkan kualitas layanan inklusi antar sekolah sangat bervariasi.

Pada tingkat nasional, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sekitar 32 ribu sekolah reguler yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi di berbagai daerah. Namun demikian, jumlah yang besar ini belum berbanding lurus dengan kualitas layanan. Tantangan utama yang ditemukan antara lain: kurangnya GPK yang berkompeten, belum memadainya fasilitas fisik aksesibel, serta absennya dokumentasi perkembangan individual (Individual Learning Plan/ILP) yang sistematis (Nuhaschool, 2025). Bahkan penelitian terkini tentang inklusivitas di madrasah menunjukkan bahwa ABK masih mengalami perundungan, belum ada dokumentasi perkembangan individual yang sistematis, terdapat keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas, serta latar belakang GPK yang belum berlatar pendidikan luar biasa (Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2026).

Secara lokal, Kota Bekasi sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Barat memiliki 638 SD yang terdiri dari 315 SD Negeri dan 323 SD Swasta berdasarkan data Dapodik Tahun Ajaran 2024/2025. Di antara ratusan sekolah tersebut, jumlah yang benar-benar siap menyelenggarakan

inklusi secara komprehensif masih sangat terbatas. Penelitian ini mengambil dua sekolah dasar Islam swasta di Kota Bekasi yang menarik untuk dikaji secara komparatif, yaitu salah satu SD swasta Islam di Kecamatan Jatiasih (selanjutnya disebut Sekolah A) dan salah satu SD swasta Islam di Kecamatan Bekasi Selatan (selanjutnya disebut Sekolah B). Keduanya sama-sama meraih akreditasi A dari BAN-S/M, namun memiliki karakteristik kelembagaan, latar belakang yayasan, sistem pendanaan, dan kapasitas fasilitas yang berbeda secara signifikan.

Sekolah A berdiri sejak akhir 1990-an di bawah naungan yayasan Islam yang berorientasi pada pendidikan berstandar tinggi berbasis karakter Islam, dengan layanan dan infrastruktur yang relatif lengkap. Sementara Sekolah B beroperasi di bawah yayasan Islam yang misi utamanya adalah keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan dhuafa, melalui sistem infaq dan subsidi silang. Perbedaan orientasi kelembagaan ini berpotensi menghasilkan perbedaan pendekatan dalam kesiapan program inklusi yang layak diteliti secara akademis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kesiapan fasilitas fisik program inklusi di Sekolah A dan Sekolah B di Kota Bekasi; (2) menganalisis sistem manajemen sekolah inklusi di kedua sekolah; dan (3) membandingkan tingkat kesiapan kedua sekolah berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena kesiapan sekolah inklusi secara mendalam dan kontekstual, bukan sekadar mengukur angka. Desain yang digunakan adalah studi kasus ganda (multiple case study) di mana dua kasus dikaji secara paralel kemudian dibandingkan (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi: Sekolah A yang merupakan salah satu SD Islam swasta di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dan Sekolah B yang merupakan salah satu SD Islam swasta di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Penelitian direncanakan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026. Identitas lengkap sekolah disimpan dalam catatan penelitian dan dapat diakses atas permintaan kepada peneliti.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala sekolah masing-masing satu orang per sekolah, guru kelas dua orang per sekolah, Guru Pendamping

Khusus (GPK) satu hingga dua orang per sekolah jika tersedia, serta satu orang staf kurikulum atau kesiswaan per sekolah. Total informan diperkirakan berjumlah delapan hingga dua belas orang.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi terstruktur menggunakan lembar observasi berdasarkan indikator kesiapan fasilitas inklusi, meliputi aksesibilitas fisik, ruang sumber belajar, ruang terapi atau konseling, dan alat peraga ABK. Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan kepala sekolah, GPK, dan guru kelas untuk menggali sistem manajemen, kebijakan inklusi, dan praktik pembelajaran adaptif. Ketiga, studi dokumen mencakup dokumen kebijakan sekolah, mekanisme PPDB inklusi, kurikulum adaptif, dan data Dapodik masing-masing sekolah.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perbandingan antar sekolah dilakukan menggunakan matriks komparasi berdasarkan empat dimensi, yaitu kesiapan fasilitas fisik, kesiapan SDM/GPK, sistem PPDB inklusi, dan sistem manajemen kurikulum adaptif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta member checking dengan mengembalikan temuan kepada informan kunci untuk dikonfirmasi.

Perlu dicatat bahwa salah satu peneliti memiliki afiliasi kelembagaan dengan Sekolah B. Untuk menjaga objektivitas, penelitian terhadap Sekolah B melibatkan observer eksternal dan proses peer debriefing bersama dosen pembimbing sebagai bagian dari prosedur pengecekan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sekolah A (Kecamatan Jatiasih)

Sekolah A merupakan sekolah dasar Islam swasta yang berada di bawah naungan sebuah yayasan Islam yang didirikan sejak pertengahan 1980-an oleh seorang tokoh parenting nasional. Jenjang SD dari sekolah ini berdiri pada akhir 1990-an sebagai respons atas permintaan wali murid dari jenjang TK di yayasan yang sama. Berdasarkan data Dapodik per April 2025, Sekolah A terakreditasi A dengan nilai 91 berdasarkan SK Akreditasi BAN-SM tertanggal Desember 2021 dan menerapkan Kurikulum Merdeka. Sekolah berlokasi di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, dan wakil kepala bidang kesiswaan.

Sekolah A memiliki 24 ruang kelas, 1 perpustakaan, dan total 470 siswa (255 laki-laki, 215

perempuan) dengan 24 guru profesional. Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan data Dapodik, kolom 'Kebutuhan Khusus Dilayani' pada Sekolah A tercatat 'Tidak ada', yang mengindikasikan bahwa status inklusi formal sekolah ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui observasi lapangan langsung.

Program khas Sekolah A meliputi metode problem based learning dan project based learning yang dipadukan dengan nilai-nilai keislaman, Tahsin dan Tahfidz Al-Quran, hafalan hadits pilihan, program pembinaan karakter (Tarbiyah Menuju Mukallaf), program istirahat terstruktur (qailullah), katering makan siang berbasis ahli gizi, layanan antar-jemput, serta layanan personalized care. Dalam bidang ekstrakurikuler, sekolah menyediakan 10 jenis kegiatan meliputi renang, basket, pramuka, pencak silat, panahan, sains club, English club, digital club, menggambar, dan futsal. Sekolah A juga memiliki ekosistem digital yang maju berupa website resmi, aplikasi mobile yang tersedia di Play Store dan App Store, serta kehadiran aktif di empat platform media sosial.

Profil Sekolah B (Kecamatan Bekasi Selatan)

Sekolah B merupakan sekolah dasar Islam swasta yang berada di bawah naungan sebuah yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Badan Operasional Sekolah dari yayasan ini dibentuk pada tahun 2009 untuk mengurus operasional dari satuan pendidikan yang dinaunginya. Sekolah berlokasi di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan website resmi yang aktif. Sekolah terakreditasi A dari BAN-S/M.

Visi Sekolah B adalah mewujudkan generasi yang cerdas, tanggap, dan berakhlakul karimah berdasarkan Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang shahih. Visi kelembagaan yayasan lebih luas, yakni menjadi sekolah terkemuka dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan generasi muda yang memiliki aqidah Islam yang benar, akhlak yang mulia, dan kecerdasan intelektual. Misi sekolah mencakup penanaman aqidah yang kuat, peningkatan pembelajaran agama, pelaksanaan pembelajaran berkarakter, penekanan pembelajaran keterampilan untuk mendorong kemandirian, serta pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan terpadu.

Sekolah B menerapkan dua kurikulum secara terpadu: kurikulum umum (diknas yang dimodifikasi, meliputi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS) serta kurikulum diniyah (aqidah, fiqih, bahasa Arab, tahfidz, dan tahsin). Sekolah memiliki dua program, yaitu kelas reguler dan kelas unggulan. Keunggulan khas

Sekolah B terletak pada sistem operasional keuangan berbasis infaq dan subsidi silang, yang menjadikan sekolah ini secara prinsip lebih terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan dhuafa — sebuah nilai yang bersinggungan erat dengan semangat inklusi sosial. Prestasi yang tercatat antara lain Juara Emas dan Perak Bahasa Inggris Tingkat Provinsi Jawa Barat, Juara 1 MHQ Kategori Juz 30, dan Juara 2 Lomba Story Telling. Yayasan juga telah mengembangkan jenjang SMP sejak tahun ajaran 2020/2021, serta SMK dan PKBM, menunjukkan pertumbuhan kelembagaan yang signifikan.

Kesiapan Fasilitas Fisik Program Inklusi

Berdasarkan standar yang berlaku, sebuah sekolah inklusi idealnya memiliki fasilitas khusus yang mendukung ABK. Penelitian tentang fasilitas ruang sekolah inklusi menunjukkan bahwa sekolah inklusi harus memiliki ruang-ruang khusus yang meliputi: (a) Ruang Belajar Individual untuk siswa belajar bersama guru secara individual atau kelompok kecil maksimum 5 siswa; (b) Ruang Renung sebagai ruang penenangan; (c) Ruang Sensori untuk stimulasi motorik; dan (d) Ruang Konsultasi untuk koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua ABK (Eprints ITENAS, 2021). Selain itu, aksesibilitas fisik seperti ramp, toilet khusus, dan penanda jalur difabel merupakan komponen penting kesiapan fasilitas inklusi.

Sekolah A menunjukkan kapasitas fisik umum yang lebih besar dengan 24 ruang kelas, perpustakaan, serta berbagai layanan pendukung seperti katering gizi, antar-jemput, dan fasilitas olahraga untuk 10 cabang ekstrakurikuler. Namun, berdasarkan penelusuran website resmi dan media sosial sekolah, tidak ditemukan informasi eksplisit mengenai ketersediaan ruang terapi, ruang sensori, alat peraga khusus ABK, maupun fasilitas aksesibilitas khusus penyandang disabilitas fisik seperti ramp atau toilet khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan fasilitas yang secara spesifik diperuntukkan bagi ABK masih perlu dikonfirmasi melalui observasi lapangan.

Sekolah B memiliki profil fasilitas umum yang lebih modest namun dengan semangat komunitas yang kuat. Fasilitas yang terdokumentasi secara publik meliputi ruang kelas, ruang guru, MCK, kantin, UKS, dan perpustakaan. Misi sekolah yang menekankan kemandirian dan keterampilan peserta didik sejalan dengan semangat pendidikan inklusi dalam arti luas. Namun, serupa dengan Sekolah A, tidak ditemukan informasi publik yang memadai mengenai fasilitas khusus untuk ABK atau aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas.

Sistem Manajemen Program Inklusi

Dari sisi sistem manajemen, Sekolah A memiliki struktur manajerial yang lebih komprehensif

dengan adanya dua wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum dan kesiswaan secara terpisah. Proses PPDB Sekolah A mensyaratkan tiga tahap: pembayaran formulir, pengisian formulir pra-registrasi, dan asesmen yang meliputi psikotes, tes penempatan, dan wawancara. Tahapan asesmen ini berpotensi menjadi pintu masuk identifikasi kebutuhan calon ABK, namun tidak ditemukan informasi khusus mengenai jalur PPDB inklusi secara eksplisit di kanal publik sekolah.

Sekolah B memiliki sistem PPDB melalui form assessment daring, menunjukkan digitalisasi proses administrasi yang baik. Secara kelembagaan, sistem subsidi silang yang diterapkan memungkinkan siswa dari berbagai latar ekonomi mengakses pendidikan berkualitas. Ketika jenjang SMP dibuka pada tahun ajaran 2020/2021, dari 18 siswa yang diterima, 11 di antaranya merupakan siswa dhuafa, 2 semi-mandiri, dan 5 mandiri berbayar — menunjukkan komitmen nyata terhadap inklusivitas sosial meskipun tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai sekolah inklusi ABK.

Dari sisi regulasi PPDB kota, Pemerintah Kota Bekasi melalui SPMB 2025 telah mengakomodasi jalur inklusi dengan mewajibkan siswa penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari dokter spesialis, psikolog, atau kartu penyandang disabilitas. Kedua sekolah perlu dipastikan apakah mengikuti mekanisme jalur inklusi ini secara resmi atau mengelola penerimaan ABK secara mandiri di luar jalur SPMB.

Perbandingan Kesiapan Kedua Sekolah

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber publik, berikut disajikan matriks komparasi kesiapan kedua sekolah:

Tabel 1. Matriks Komparasi Kesiapan Program Inklusi Sekolah A dan Sekolah B

Dimensi	Sekolah A (Jatiasih)	Sekolah B (Bekasi Selatan)
Akreditasi	A (nilai 91, 2021)	A
Naungan Yayasan	Yayasan Islam (est. 1986, SD berdiri 1998)	Yayasan Islam (BOS SD est. 2009)
Kurikulum	Kurikulum Merdeka + Keislaman	Diknas Modifikasi + Diniyah
Jumlah Ruang Kelas	24	Perlu konfirmasi lapangan
Jumlah Siswa	470	Perlu konfirmasi lapangan
Jumlah Guru	24	Perlu konfirmasi lapangan
Program Khusus	PBL, PjBL, TMM, Qailullah, Tahfidz	Kelas Reguler + Kelas Unggulan, Tahfidz

Dimensi	Sekolah A (Jatiasih)	Sekolah B (Bekasi Selatan)
Jenjang Tersedia	TK, SD, SMP, SMA	SD, SMP, SMK, PKBM
Sistem Pendanaan	Komersial (SPP + uang pangkal)	Infra + Subsidi Silang
Platform Digital	Website + Aplikasi mobile + 4 medsos	Website aktif + media sosial
Status Inklusi (Dapodik)	"Tidak ada" (belum terdaftar)	Belum terkonfirmasi publik
Fasilitas Khusus ABK	Belum terkonfirmasi publik	Belum terkonfirmasi publik
Ketersediaan GPK	Belum terkonfirmasi	Belum terkonfirmasi
PPDB Jalur Inklusi	Belum tersedia eksplisit	Belum tersedia eksplisit
Aksesibilitas Fisik ABK	Jalur disabilitas, Ruang Terbuka Hijau	Belum terkonfirmasi
Prestasi Akademik	Spelling Bee Tingkat Provinsi	MHQ, Story Telling, Bahasa Inggris Prov. Jabar

Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara kedua sekolah bukan terletak pada ada atau tidaknya program inklusi yang berjalan, melainkan pada orientasi kelembagaan dan kapasitas sistem pendukungnya. Sekolah A unggul dalam kelengkapan infrastruktur fisik umum, sistem manajemen terdigitalisasi, dan kapasitas sumber daya manusia yang lebih terstruktur. Sementara Sekolah B memiliki keunggulan pada nilai inklusi sosial-ekonomi melalui sistem subsidi silang, orientasi kemandirian peserta didik, dan keterbukaan terhadap siswa dari berbagai latar belakang — yang merupakan fondasi penting dari semangat pendidikan inklusif dalam arti luas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan inklusi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas fisik, tetapi juga oleh nilai-nilai komunitas, kepercayaan, norma bersama, dan jaringan interaksi yang terbentuk di sekolah sebagai fondasi penting bagi berlangsungnya integrasi sosial ABK yang bermakna (Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2026). Namun demikian, kedua dimensi — fisik maupun sosial — sama-sama diperlukan agar layanan inklusi dapat berjalan secara optimal dan terstandarisasi sesuai amanat Permendiknas No. 70 Tahun 2009.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif terhadap data yang bersumber dari dokumen publik, website resmi kedua sekolah, basis data Dapodik Kemdikbud, dan hasil penelusuran digital, dapat disimpulkan bahwa Sekolah A (Kecamatan Jatiasih) dan Sekolah B (Kecamatan Bekasi Selatan)

memiliki profil kesiapan program inklusi yang berbeda namun saling melengkapi. Sekolah A menunjukkan keunggulan dalam kelengkapan infrastruktur fisik umum, kapasitas manajemen terdigitalisasi, dan struktur organisasi yang lebih komprehensif. Di sisi lain, Sekolah B memiliki kekuatan pada dimensi inklusivitas sosial-ekonomi melalui sistem subsidi silang dan infaq, nilai kemandirian peserta didik, dan orientasi kurikulum terpadu yang menghargai keberagaman potensi.

Namun, kedua sekolah belum menampilkan informasi eksplisit mengenai fasilitas khusus ABK, ketersediaan GPK yang terlatih, mekanisme PPDB jalur inklusi, maupun aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas melalui kanal publik mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesiapan formal sesuai standar Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 masih perlu ditingkatkan secara signifikan di kedua sekolah, atau paling tidak dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan: (1) kedua sekolah perlu melakukan audit kesiapan inklusi secara mandiri mengacu pada indikator Permendiknas No. 70/2009 dan Index for Inclusion (Booth & Ainscow, 2011); (2) pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan perlu memberikan pendampingan teknis dan pembiayaan untuk pengadaan fasilitas khusus ABK dan pelatihan GPK; (3) kedua sekolah perlu mengembangkan sistem Individual Learning Plan (ILP) untuk setiap ABK; dan (4) informasi program inklusi perlu dikomunikasikan secara transparan kepada publik melalui website dan media sosial resmi sekolah.

DAFTAR REFRENSI

- Asiyah, D (2018). Dampak pola pembelajaran sekolah inklusi terhadap anak berkebutuhan khusus. ... Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal, researchgate.net, <https://www.researchgate.net/profile/Dewi-Asiyah-4/publication/342770481_Dampak_Pola_Pembelajaran_Sekolah_Inklusi_terhadap_Anak_Berkebutuhan_Khusus/links/63537fe396e83c26eb40657a/Dampak-Pola-Pembelajaran-Sekolah-Inklusi-terhadap-Anak-Berkebutuhan-Khusus.pdf?origin=journalDetail&_tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9>
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools (3rd ed.). Bristol: CSIE.
- Dapa, AN, & Tuerah, RMS (2021). Manajemen Sekolah Inklusi., books.google.com, <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LphREQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&>

- dq=sekolah+inklusi&ots=5O-tuDryP2&sig=bUOiQBWaP2SZMc2oSFHYHdCNxVQ>
- Herawati, N. I. (2016). Pendidikan inklusif. *Edu Humaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 1-8.
- Hufon, A, Imron, A, & Mustiningsih, M (2016). Manajemen Kesiswaan Pada Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Humaniora*
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Kemdiknas.
- Nuhaschool. (2025). Panduan lengkap sekolah inklusi Jabodetabek untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Diakses dari <https://nuhaschool.sch.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pusdatin Kemdikbud. (2025). Data pokok sekolah dasar Kota Bekasi. Diakses dari <https://dapo.dikdasmen.go.id>
- Ru'iyah, S., Akhmad, F., Putriyani, D., & Sulistiawan, A. (2021). Tantangan guru pendidikan agama Islam pada sekolah inklusi di Yogyakarta. *Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 10(1), 70-90.
- Sumarni. (2019). Pengelolaan pendidikan inklusif di madrasah. *Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 17(2), 148-161.
- UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Paris: UNESCO.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Yusuf, M. (2014). Manajemen sekolah berbasis pendidikan inklusif. Surakarta: UNS Press.
- Zakia, D. L. (2015). Guru pembimbing khusus (GPK): Pilar pendukung inklusi. *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 1-10.